

LAPORAN
AKHIR TAHUN

2017



Jl. Kalibata Timur 4D No 6 Kalibata,
Jakarta Selatan

Tlp : 021.790.1885 / 799.4015

Fax : 021.799.4005

w : www.antikorupsi.org

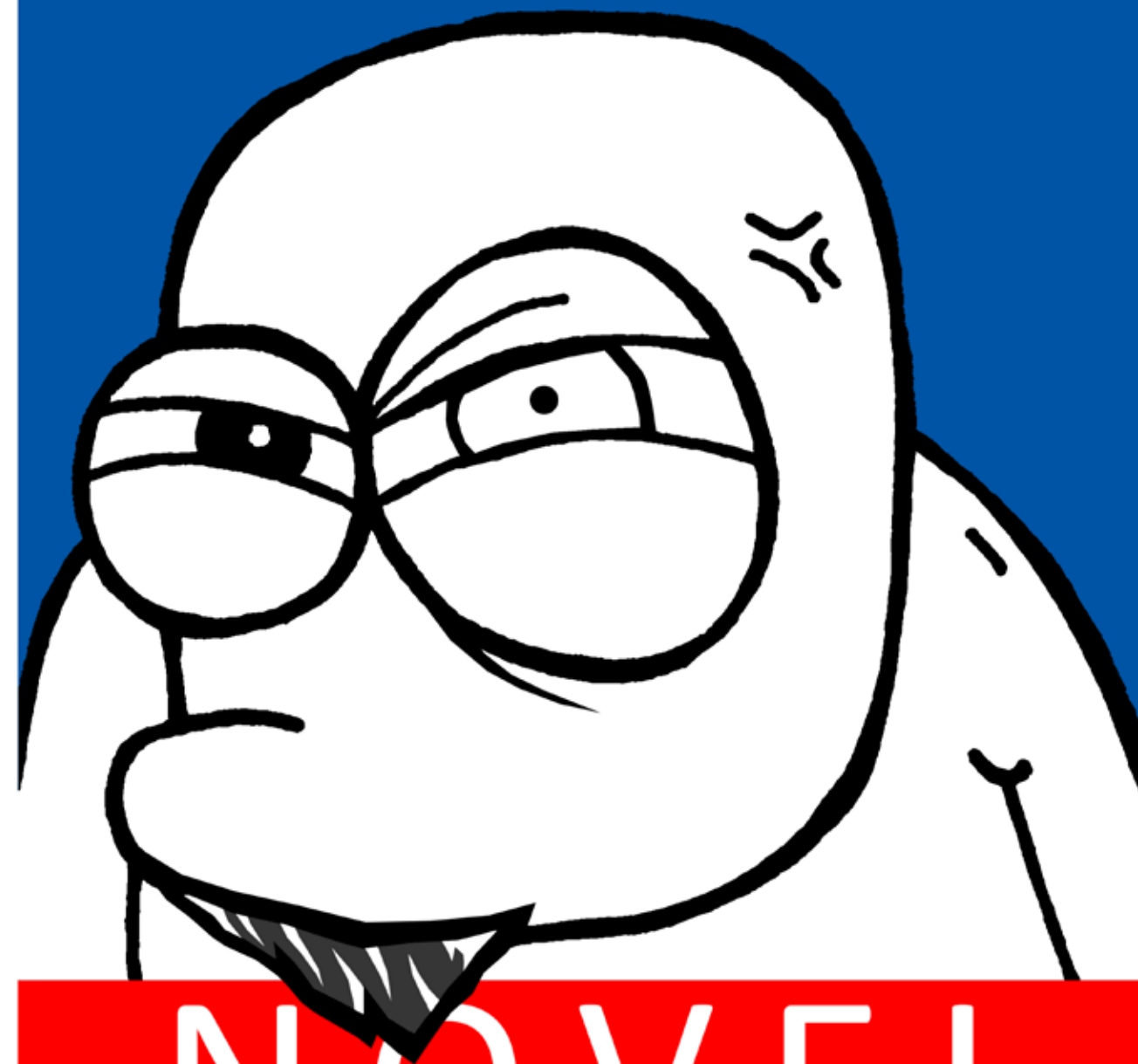
e : icw@antikorupsi.org

t : [@sahabaticw](https://www.instagram.com/sahabaticw)/[@Antikorupsi](https://www.instagram.com/Antikorupsi)

f : Sahabat ICW

ig : Sahabat ICW

AIR KERAS MENEROR DERAS
BERANTAS KORUPSI SAMPAI TUNTAS



NOVEL

B A S W E D A N

Karya The Popo yang disumbangkan
untuk kegiatan galang dana publik
Dokumentasi: ICW



Aksi teatrikal pahlawan super yang mendukung penyelamatan KPK Dokumentasi: ICW

Kata Pengantar

MEMPERBANYAK SENJATA MELAWAN KORUPSI

Banyak yang meramal, karena Koordinator ICW periode pertama, Teten Masduki merapat ke Istana setelah ditunjuk Jokowi sebagai Kepala Staf Presiden (KSP), ICW tidak akan kritis lagi dan bersuara lantang. Prasangka dan kekhawatiran itu tentu cukup beralasan karena kita telah terbiasa melihat bagaimana sebuah visi perjuangan hancur lebur karena kekuasaan. Banyak yang sudah memberikan contoh bahwa gagasan perubahan tergadai atau dibarter dengan limpahan materi.

Pertanyaannya, mengapa hal itu tidak terjadi pada ICW? Jawabannya sederhana, karena ICW sebagai organisasi memiliki kultur yang berbeda. Budaya organisasi ICW yang telah terbangun sejak lama tak memungkinkan adanya praktek semacam itu, sehingga hubungan antara aktivis ICW yang kemudian menjadi pejabat publik dengan organisasi bukanlah hubungan subordinat. Tidak ada pula relasi senior-junior. ICW tetap ada pada jalurnya sebagai kelompok penekan, siapapun yang ada pada puncak kekuasaan. Mengapa? Karena para prinsipnya, kekuasaan itu harus terus diawasi mengingat watak dasarnya yang mudah diselewengkan. ICW akan selalu setia pada pilihan ini.

Maka ICW terus mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap berlawanan dengan semangat antikorupsi. Tahun 2017, salah satu laporan utama yang diangkat ICW adalah posisi pragmatis Jokowi dalam melihat isu *good governance* karena hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan ekonomi. Jokowi juga abai terhadap penuntasan kekerasan yang menimpa Novel Baswedan,

penyidik senior KPK dengan tidak merespon tuntutan publik agar membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). ICW juga menilai bahwa Pemerintahan Jokowi tidak menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas karena sampai saat ini, Strategi Nasional Program Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) tak kunjung disahkan sebagai peraturan.

Selain respon atas isu aktual, ICW menggagas beberapa pendekatan programatik yang diarahkan untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Salah satu yang penting adalah bagaimana ICW memonitor potensi kerugian keuangan negara pada sektor Sumber Daya Alam (SDA). Instrumen pengukuran dan analisis potensi kerugian negara telah disusun dan disosialisasikan kepada jaringan kerja antikorupsi di beberapa daerah. Pada sisi belanja negara, ICW mengembangkan dan memutakhirkan instrumen opentender.net sebagai alat pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Beberapa produk investigasi berdasarkan opentender.net telah dipublikasikan oleh para jurnalis yang terlibat dalam program *fellowship* opentender.net.

Selain itu, sasaran advokasi 2017 adalah pengawasan seleksi pejabat publik, yakni KPU dan Bawaslu. Penelusuran rekam jejak dan lobi untuk memastikan calon-calon bermasalah tidak dipilih oleh Panitia Seleksi, dan sebaliknya, memilih calon yang paling bersih rekam jejaknya adalah dua hal utama yang dilakukan. Pada aspek pemberdayaan, ICW memprioritaskan kerja pendampingan pada beberapa mitra lokal yang menyusun rencana strategis dan evaluasi kerja, sekaligus menyelenggarakan Sekolah Anti Korupsi (SAKTI)

sebagai strategi mencetak kader-kader antikorupsi muda. ICW merumuskan strategi baru bagaimana menyusun kerja penguatan warga dengan biaya yang murah dan menjangkau lebih banyak sasaran melalui akademi antikorupsi, sebuah program e-learning yang melengkapi SAKTI sehingga pendekatan pelatihan antikorupsi menjadi lebih komprehensif.

Tak lupa, karena salah satu kekuatan ICW adalah pada organisasi, penguatan internal menjadi salah satu kerja yang tidak bisa ditinggalkan. ICW telah menyelenggarakan pelatihan staff pada bidang penggalangan dana publik, pengembangan kemampuan bahasa Inggris, serta modernisasi sistem keuangan untuk mengefektifkan kerja-kerja pelaporan keuangan dan akuntabilitas keuangan ICW.

Terakhir, ucapan terima kasih tak terhingga kepada para *supporters* yang terus memberikan dukungan kepada ICW dalam mengembangkan advokasi antikorupsi dan kampanye publik. Ucapan terima kasih juga ICW sampaikan kepada para donor seperti DANIDA, USAID, The Asia Foundation, Ford Foundation, TIFA Foundation, ECF, dan HIVOS yang konsisten memberikan dukungan program dan pendanaan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Kepada kalian semua, ICW selalu menyambut hangat kerjasamanya.

Kalibata, Januari 2018

Adnan Topan Husodo
Koordinator

Lukisan Karya Malela Mahagasarie yang dilelang kepublik dalam rangka menggalang dukungan untuk penyidik KPK Novel Baswedan

Dokumentasi: ICW

DAFTAR ISI

MEMPERBANYAK SENJATA MELAWAN KORUPSI	6
PARA SUPPORTERS, SALAM ANTI KORUPSI!	10
PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGAWASAN MASYARAKAT	12
ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK	18
MENGAWASI SELEKSI PEJABAT PUBLIK	24
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI	32
PENGUATAN KAPASITAS JARINGAN ANTIKORUPSI	40
PENGUATAN INTERNAL ORGANISASI	42
PENDIDIKAN WARGA	45
MEMPERKUAT KEMAUAN POLITIK NEGARA	49
LAPORAN KEUANGAN ICW 2017	50



PARA SUPPORTERS, SALAM ANTIKORUPSI!

Tahun 2017 adalah masa dimana ICW sangat merasakan kehadiran dan dukungan *supporters*. Gotong royong memupuk generasi muda antikorupsi melalui Sekolah Antikorupsi (SAKTI) adalah salah satu buktinya. SAKTI yang telah diselenggarakan tiga kali sejak 2013 silam merupakan sebuah strategi yang digagas ICW untuk melahirkan para aktivis anti korupsi muda. Kami membidik anak-anak muda yang masih duduk di bangku perkuliahan sebagai calon peserta. Dua puluh dua peserta SAKTI yang tersebar dari Sumatera hingga Papua telah mengikuti SAKTI, setelah mereka melewati proses seleksi yang cukup ketat dan panjang. Setidaknya, sudah ada 60 lebih alumni SAKTI yang telah dan akan terus dilibatkan dalam berbagai gerakan advokasi antikorupsi.

Berbeda dari SAKTI sebelumnya, SAKTI 2017 terasa istimewa karena seluruh biaya penyelenggaraannya didukung oleh *supporters*, baik yang berkategori individu maupun badan hukum. Secara khusus, laporan pertanggungjawaban pelaksanaan SAKTI 2017 telah kami kirimkan kepada seluruh donatur. Selain para donatur SAKTI 2017, dukungan dari *supporters* juga lahir dalam bentuk yang lain. Donasi bulanan dari penyumbang individu telah digunakan untuk beberapa agenda advokasi, diantaranya pemantauan sidang pengadilan kasus KTP-el dan penelusuran rekam jejak calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang pada akhirnya melahirkan Saldi Isra, sosok yang dikenal bersih sebagai hakim terpilih.

Kekuatan dan latar belakang profesional yang berbeda dari masing-masing *supporters* melahirkan dukungan yang beragam. Dukungan dalam bentuk karya, desain, *endorsement* menambah dosis dan semangat advokasi ICW, meskipun lingkungan eksternal, terutama politik tidak dapat diprediksi dan sangat dinamis. Oleh karena itu, gerakan antikorupsi harus terus memupuk dukungan dari berbagai kalangan dan kelompok agar tekanan publik kian besar dan Pemerintah lebih mau mendengar.

Kita sedang berinvestasi bagi masa depan Indonesia yang lebih baik. Kerja sama dan dukungan dari para *supporters* membuat semua mimpi ini pelan-pelan akan menjadi nyata. Kita percaya itu.

Kalibata, Januari 2018

Adnan Topan Husodo
Koordinator



Tren Penanganan Kasus Korupsi 2017

576

Kasus Korupsi

1298

Tersangka

RP6,5 T

Kerugian Negara

RP211 M

Nilai Suap

PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENGAWASAN MASYARAKAT

Untuk mengefektifkan pemantauan penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat, ICW berusaha menyediakan instrumen yang mudah digunakan (*user friendly*). Harapannya, instrumen yang telah disusun oleh ICW dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat sipil maupun masyarakat pada umumnya untuk melakukan pengawasan atas kebijakan sektor publik.

MENDESAIN MODUL PEMANTAUAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA SEKTOR SUMBER DAYA ALAM (SDA)

Dalam rangka memperkuat kapasitas masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, khususnya pada sektor Sumber Daya Alam (SDA), pada tahun 2017 ICW menyusun dua modul yakni modul monitoring penerimaan negara sektor mineral dan batubara serta modul pemantauan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA). Penyusunan kedua modul ini dimulai dengan pemetaan proses bisnis dan persoalan pada sektor SDA.

Sebelum modul disusun, guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, ICW telah melakukan serangkaian kegiatan diskusi terfokus dan masukan dari *stakeholders*, yakni jaringan kerja CSO sektor SDA seperti PWYP, Jatam, AURIGA dan CSO lokal seperti MaTA Aceh, FITRA Riau, dan lain-lain. Selain itu terlibat juga perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Dalam prakteknya, kegiatan penyusunan modul ini juga dibarengi dengan kegiatan penelusuran indikasi kerugian negara dari mineral dan batubara.

Dengan hadirnya modul monitoring penerimaan negara dan pemantauan GNPSDA, kelompok masyarakat sipil kini telah memiliki panduan dalam melakukan pengawasan tata kelola sektor SDA. Modul ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan pemantauan terhadap kewajaran penerimaan negara dari

batubara dan mineral lainnya. Begitu juga dengan modul pemantauan GNPSDA yang telah dimanfaatkan oleh mitra kerja ICW di berbagai wilayah seperti di Aceh, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan GNPSDA yang diinisiasi oleh KPK sejak 2014.



Illustrasi ruang sidang pengadilan tipikor Dokumentasi: ICW

PANDUAN MEMANTAU PERSIDANGAN KASUS KORUPSI

Penangkapan terhadap hakim, jaksa, maupun advokat yang terlibat dalam perkara korupsi bukan lagi berita baru yang mengejutkan. Sejak 2005-2017, tercatat ada 22 advokat yang terjerat perkara korupsi, sedangkan sejak 2012-2017 sudah ada 25 hakim yang ditindak oleh KPK, dan 9 orang jaksa yang sudah ditangkap oleh KPK. Gambaran ini menunjukkan masih rawannya praktek korupsi di lembaga peradilan, termasuk pengadilan.

Berangkat dari kesadaran tersebut, ICW menginisiasi pembuatan modul pemantauan persidangan yang dapat digunakan oleh publik maupun masyarakat awam lainnya

guna meminimalisir praktek penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum dan hakim. Instrumen pemantauan persidangan ini sebenarnya telah dikembangkan pada 2015-2016, dan mulai diujicobakan pada sidang perkara korupsi yang melibatkan M. Sanusi pada Agustus 2016 dan pada 2017, dilakukan beberapa perbaikan dan penyempurnaan.

Penyusunan modul pemantauan ini dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perbandingan dengan instrumen maupun modul serupa yang dimiliki oleh CSO lainnya. Perbandingan ini dilakukan untuk mengidentifikasi secara lebih rinci hal-hal yang relevan dan tidak dengan pemantauan persidangan perkara korupsi. Diskusi dan wawancara dengan para praktisi dilakukan untuk memperkuat modul pemantauan. Rangkaian ini ditutup dengan *review* oleh praktisi untuk menyempurnakan rancangan modul yang sudah dibuat.

Uji coba modul ini sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi dari STHI Jentera. Adapun persidangan yang dipantau dengan modul ini adalah persidangan perkara suap reklamasi Teluk Jakarta dengan terdakwa M. Sanusi dan persidangan perkara KTP-El dengan terdakwa Irman dan Sugiharto. Hasil pemantauan ini bermanfaat untuk mengetahui gambaran detail kondisi persidangan, proses persidangan, hingga perilaku masing-masing pihak baik hakim, jaksa penuntut umum, kuasa hukum terdakwa, saksi, dan terdakwa sendiri. Selain itu, hasil pemantauan berguna untuk penyusunan rencana advokasi selanjutnya, manakala dalam pemantauan ditemukan adanya dugaan pelanggaran kode etik maupun perilaku menyimpang dari salah satu pihak.

Sebagai jurnalis yang pernah menggunakan perangkat ini, saya sangat terbantu. *Opentender.net* berfungsi seperti peta dan kompas, mengarahkan wartawan kepada pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa.

Muhammad Yunus
- Jurnalis
Makassarterkini.com

OPENTENDER.NET: MENGAWASI LELANG ELEKTRONIK SEKTOR PUBLIK

Proses pengadaan barang dan jasa sektor publik masih menjadi titik rawan korupsi di Indonesia. Meskipun pemerintah telah menggunakan sistem pengadaan secara elektronik, namun hal ini tidak serta merta menghilangkan praktek korupsi didalamnya.

Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut memantau sektor pengadaan barang dan jasa, sejak 2013 ICW menyediakan alat pengawasan berbasis elektronik bernama *opentender.net*. Instrumen berbasis web ini mampu mengidentifikasi potensi kecurangan (*fraud*) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara lelang elektronik. Penilaian atas potensi kecurangan dalam sebuah pengadaan barang dan jasa dinilai berdasarkan lima indikator, yaitu, nilai kontrak, penghematan, partisipasi, monopoli, dan waktu. Dengan publik mengetahui potensi kecurangan dalam sebuah pengadaan barang dan jasa, diharapkan mampu memberikan tekanan kepada pemerintah berbasis informasi dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Memasuki tahun kelima penerapan *opentender.net*, ICW merasa perlu melakukan pengembangan. Hal ini didasari atas perubahan aturan mengenai pengadaan barang dan jasa serta informasi yang semakin lengkap, diantaranya data mengenai perusahaan pemenang lelang dan perusahaan yang masuk daftar hitam (*blacklist*).

Sejauh ini pengembangan yang telah dilakukan mencakup penambahan informasi dan perubahan tampilan web *opentender.net*. Dari segi informasi, *opentender.net* versi terbaru telah menyediakan data mengenai perusahaan yang masuk ke dalam daftar hitam. Sedangkan dari segi tampilan, ICW mengubah keseluruhan tatap muka web *opentender.net* supaya memudahkan masyarakat untuk memahami cara menggunakan dan memahami data yang ada didalamnya. selain itu, ICW juga menambahkan fitur visualisasi dalam bentuk grafik dan peta. ICW berharap pengembangan instrumen ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam memantau pengadaan barang dan jasa pemerintah.



BERANDA

DATA TENDER

DATA VISUAL

TOP 10 TENDER

ARTIKEL

TENTANG WEBSITE

OPENTENDER.NET

MEMBUKA DATA, MENCEGAH KORUPSI

Menyajikan data tender pengadaan barang & jasa proyek pemerintah

IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN

Mengidentifikasi dan mengkonfirmasi peluang penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik.



OPTIMALISASI TENDER ONLINE

Mengoptimalkan penggunaan E-Proc dalam pengadaan di tingkat Pusat dan Daerah.



MINIMALISASI PENYIMPANGAN

Menutup ruang-ruang persaingan usaha tidak sehat dan korupsi.



INSTRUMEN PENGAWAS

Menyediakan instrumen untuk menemukan potensi pelanggaran dalam proses e-proc.



AMUNISI AWAL INVESTIGASI

Membenkan gambaran awal sebelum investigasi penyimpangan.



IDENTIFIKASI PENYIMPANGAN

Mengidentifikasi dan mengkonfirmasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.



Halaman muka website *opentender.net*
Dokumentasi: ICW



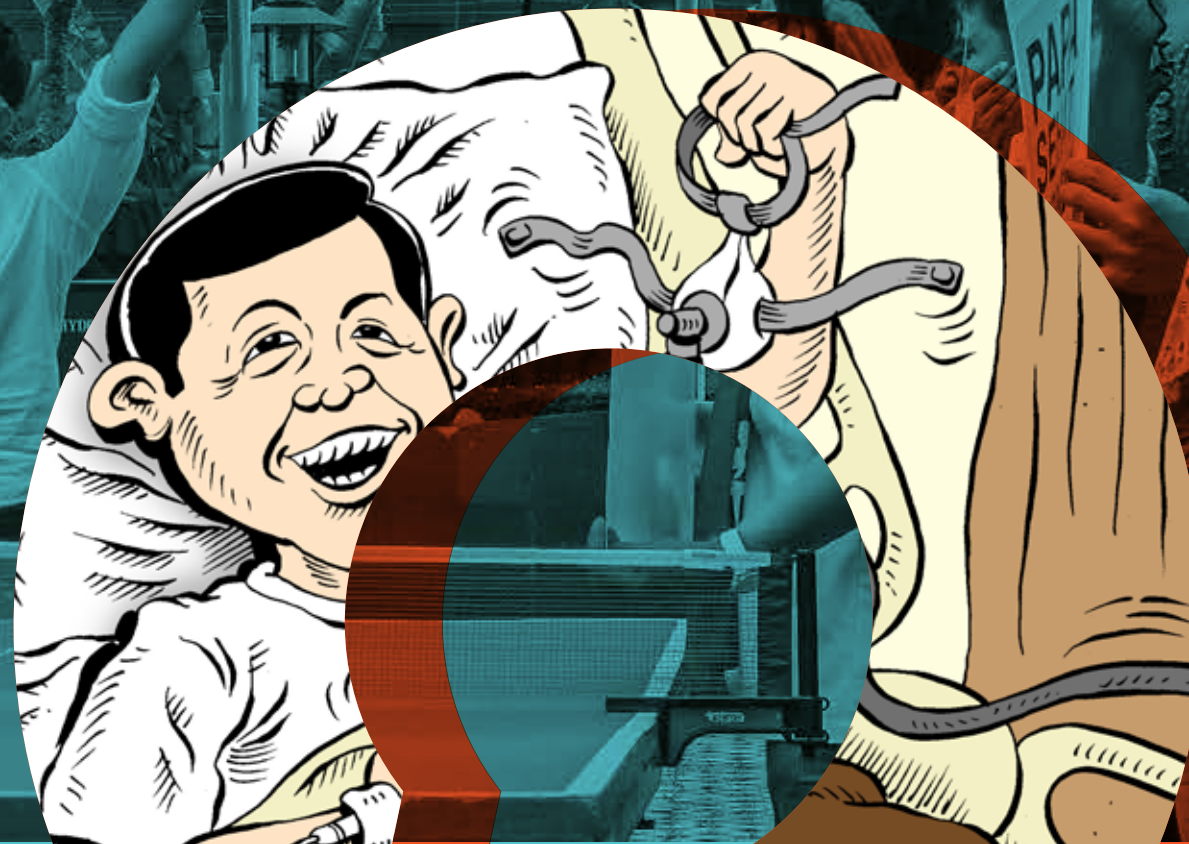
KASUS SETYA NOVANTO

Sepanjang tahun 2017, salah satu kasus korupsi yang menyita perhatian publik adalah penanganan kasus KTP-Elektronik oleh KPK. Tidak hanya besar dari segi kerugian keuangan negara yang mencapai 2,3 Triliun rupiah, akan tetapi juga "kakap" dari segi aktor yakni melibatkan mantan ketua DPR RI, Setya Novanto. Bergulirnya kasus ini penuh lika liku. Novanto yang dijadikan tersangka oleh KPK pada tanggal 17 Juli 2017, melakukan perlawanan hukum melalui gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sempat menang dalam gugatan tersebut, KPK kemudian kembali menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus yang sama untuk kedua kalinya.

Sepanjang bergulirnya kasus tersebut, ICW terus terlibat dalam upaya pengawalan gugatan praperadilan, aksi dukungan terhadap KPK agar kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka hingga desakan untuk segera menahan yang bersangkutan melalui *tagline* #tahanSN. Keberhasilan yang dicapai KPK tentu tidak lepas dari setiap upaya dan dukungan moral yang dilakukan oleh elemen masyarakat sipil.

Karya Mice Cartoon yang didonasikan untuk penggalangan dana publik ICW
Dokumentasi: ICW

Aksi teatral untuk menyindir Setya Novanto yang menghindari pemeriksaan oleh KPK
Dokumentasi: ICW



PAPA
BO'ONG
BILANG
SAKIT
TAPI MAIN
PINGPONG

ADVOKASI KEBIJAKAN PUBLIK

CSO yang aktif melakukan advokasi merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi yang sehat. ICW sebagai salah satu CSO yang bergerak pada isu antikorupsi menyadari bahwa pengawasan terhadap berbagai macam proses pengambilan kebijakan publik harus terus dilakukan guna mengurangi masalah korupsi. Selain itu, mendorong perubahan kebijakan publik yang berdimensi pada kepentingan publik luas merupakan sasaran advokasi yang strategis agar publik menerima manfaat dari kebijakan publik yang dibuat oleh Negara. Advokasi yang dilakukan oleh ICW pada sebagian besarnya menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya.

LAPORAN KEKURANGAN PENERIMAAN NEGARA SEKTOR SDA

Sebagai bagian dari gerakan bersama dalam pemberantasan korupsi di sektor SDA, keberadaan modul pemantauan diharapkan akan membantu dalam kegiatan advokasi dan penegakan hukum. Sebagai contoh, berdasarkan penelusuran ICW dari periode 2006-2016 untuk kegiatan ekspor batubara Indonesia diindikasikan nilai transaksi yang kurang (tidak) dilaporkan mencapai Rp 365,3 triliun yang berakibat pada indikasi kerugian negara sebesar Rp 133,6 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada komoditi timah, dalam periode 2004-2016 diindikasikan nilai ekspor timah (HS 8001 dan HS 8003) yang tidak tercatat senilai Rp 101,7 triliun dengan indikasi kerugian negara mencapai Rp 8,3 triliun. Juga pada kegiatan ekspor bijih nikel Indonesia periode 2007-2015, dimana kerugian negara diindikasikan sebesar Rp 5,8 triliun dari kegiatan ekspor yang tidak dilaporkan.

Sebagai tindak lanjut, hasil kajian monitoring penerimaan negara ini sudah dilaporkan kepada pihak terkait; baik pada pemerintah yaitu kementerian ESDM dan Keuangan maupun aparat penegak hukum yaitu KPK. Hal ini dilakukan agar bisa dijadikan bahan untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta mekanisme penegakan hukum lebih lanjut.

Ada temuan ICW (Indonesia Corruption Watch) tentang ekspor Batubara sekitar Rp350 triliun yang tidak dilaporkan ke Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga ada potensi kerugian negara, akan seperti apa?

"Kita akan merapat ke mereka (ICW), melihat data itu dan setelah kita dapat data itu, kita akan validasi untuk mencari kebenaran data itu. Kalau sudah ada data valid dan akurat kita akan gunakan untuk menguji kepatuhan mereka dalam SPT-nya. Kalau sudah masuk dalam SPT, clear semua".

Yuli Kristiyono, Direktur
Penegakan Hukum Dirjen
Pajak, Kemenkeu

Pada tingkat daerah hasil kajian ini juga digunakan oleh mitra dan jaringan ICW sebagai bahan kampanye serta advokasi dalam isu lokal. Dengan adanya modul panduan yang dilengkapi dengan hasil penelusuran kerugian negara bisa menjadi dasar bagi mitra ICW untuk mengembangkan kapasitas dan alat monitoring yang sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Seperti yang dilakukan oleh jaringan ICW di Bangka Belitung, dengan menggunakan data indikasi kerugian negara dari ekspor timah mereka mendorong agar dilakukan penghentian (moratorium) pemberian izin timah. Hal yang sama juga dilakukan oleh ICW lewat aparat penegak hukum (KPK) dan institusi di bawah presiden untuk meninjau kebijakan pengelolaan dan pengawasan perdagangan timah. Diharapkan advokasi berlapis (pusat dan daerah) yang didukung dengan pengetahuan dan data yang baik akan menghasilkan perubahan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih konkret.

MENELUSURI KECURANGAN LELANG ELEKTRONIK MELALUI OPENTENDER.NET

Instrumen opentender.net tidak akan efektif menjadi alat pengawasan jika tidak ada atau hanya segelintir orang yang mengerti dan menggunakannya. Oleh karena itu, ICW bekerjasama dengan berbagai pihak, khususnya kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah untuk dapat menggunakan opentender.net.

Pada 2017, ICW mendorong jurnalis untuk memanfaatkan opentender.net dengan menyelenggarakan *fellowship* di daerah Manado, Makassar, dan Kendari. Jurnalis dipilih karena dianggap sebagai kelompok strategis yang dapat menggunakan data opentender.net sebagai sumber informasi dalam tulisan jurnalistik terkait topik transparansi dan korupsi. Dengan menggunakan data opentender.net, jurnalis dapat lebih mudah mengidentifikasi jenis proyek pengadaan yang akan dipilih sebagai objek penelusuran. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh jurnalis adalah memperdalam temuan potensi kecurangan dalam opentender.net dengan mencari data dan wawancara ke lapangan.

Hasil dari *fellowship* tersebut berupa empat tulisan mendalam yang dipublikasi di media online maupun offline, yaitu *Main Mata Tender Minibus* yang memaparkan penyimpangan dalam

pengadaan Minibus VIP bagi pemerintah kota Manado, *Gelap Bantuan Traktor Tangan* yang memaparkan ketidakjelasan penerima dari pengadaan traktor tangan di kota Makassar, *Bantuan Sapi Gagal Temui Sasaran* yang memaparkan ketidaksesuaian pengadaan sapi antara yang direncanakan dengan yang diterima masyarakat, dan *Polemik Pengadaan Makanan Atlet* yang memaparkan carut marut pengadaan konsumsi dalam pelatda PON 2016. Keempat tulisan tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa data dan metode yang digunakan dalam opentender.net untuk menilai potensi kecurangan dalam sebuah pengadaan barang dan jasa cukup valid dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi proses lelang elektronik.



Foto sapi bantuan yang diterima oleh penduduk desa di Jeneponto Sulawesi Selatan
Dokumentasi: ICW

MENGAWAL DAN MEMASTIKAN KEBIJAKAN ANTIKORUPSI NEGARA

Pada 2017, ICW aktif melakukan advokasi perubahan kebijakan melalui mekanisme uji materil Undang-Undang (*Judicial Review-JR*) di Mahkamah Konstitusi (MK). JR tersebut dilakukan baik sebagai pihak pemohon, maupun pihak terkait, khususnya untuk JR UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (UU Pemasarakatan).

Dalam JR UU Pemasarakatan, ICW bersama dengan ICJR, dan PBHI menjadi pemohon pihak terkait pada permohonan nomor 54/PUU-XV/2017 yang diajukan oleh Irman Gusman, Suryadharma Ali, dan OC Kaligis, dan permohonan nomor 82/PUU-XV/2017 yang dimohonkan oleh Kamaludin Harahap. Namun, kedua permohonan uji materil ini diputus ditolak pasca sidang pendahuluan, bahkan sebelum masuk dalam pokok permohonan.

Pada permohonan uji materil kedua, ICW bersama dengan YLBHI, KPBI, dan Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas, menguji kewenangan DPR RI dalam menerapkan hak angketnya terhadap KPK. Permohonan ini diajukan sebagai respon terhadap tindakan DPR RI yang dipandang bertentangan dengan hukum, dalam menggunakan hak angketnya untuk menginvestigasi KPK, padahal KPK bukan termasuk dalam pelaksana fungsi eksekutif, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3.

Proses persidangan uji materil ini diwarnai dengan polemik lain terkait dengan perilaku Hakim Konstitusi yang juga menjabat sebagai Ketua MK, Arief Hidayat. Usai masa sidang untuk pokok permohonan nomor 36/PUU-XV/2017 dan nomor 47/XV-PUU/2017, Arief Hidayat terbukti bertemu secara tidak patut dengan politisi DPR. Pertemuan itu diduga untuk melancarkan pemilihannya kembali sebagai Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI, dimana salah satu hal yang dijadikan tawaran dalam lobi tersebut adalah permohonan yang diajukan baik oleh Wadah Pegawai (WP) KPK maupun dari masyarakat sipil, akan ditolak.

Busyro Muqoddas, YLBHI, KPBI, dan ICW sebagai pemohon pada permohonan nomor 47/XV-PUU/2017, memutuskan untuk mencabut permohonan uji materil pada 7 Desember 2017. Pencabutan ini dilakukan pasca Arief Hidayat dilaporkan kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi pada 6 Desember 2017 oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK yang terdiri dari Perludem, Kemitraan, ICW, dan GAK.

Pada akhirnya, Arief Hidayat terbukti bertemu secara tidak patut dengan politisi DPR RI, dan dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis. Menurut Dewan Etik Hakim Konstitusi, Arief Hidayat tidak terbukti melakukan lobi-lobi politik untuk seleksi Hakim Konstitusi perwakilan DPR RI.

#LAWANKORUPTOR



#TOLAKHAKANGKET

Karya Alit Ambara yang didonasikan untuk penggalangan dana publik ICW
Dokumentasi: ICW

ANGKET TERHADAP KPK

Salah satu fase krusial dalam penanganan kasus KTP-Elektronik oleh KPK adalah terjadinya dentuman serangan politik yang ditandai dengan bergulirnya pansus hak angket terhadap KPK oleh DPR. Sulit mengelakkan telah terjadinya perlawanan politik terhadap upaya penegakan hukum oleh KPK.

Melihat itu semua, ICW dan koalisi masyarakat sipil melakukan sejumlah langkah advokasi membentengi proses hukum agar tetap berjalan. Kami menguji aspek legalitas keberadaan pansus angket terhadap KPK kepada Mahkamah Konstitusi. Selain itu, ICW juga melakukan evaluasi penilaian kerja pansus angket KPK untuk mengukur tujuan pembentukan pansus dengan realisasinya. Penolakan terhadap pansus hak angket KPK juga secara massif dilakukan oleh mahasiswa dan jaringan-jaringan ICW di berbagai daerah.



Aksi teatrikal para koruptor yang mendukung dibentuknya Pansus Hak Angket terhadap KPK
Dokumentasi: ICW



MENGAWASI SELEKSI PEJABAT PUBLIK

Korupsi biasanya terjadi karena pejabat publik yang terpilih, baik melalui mekanisme seleksi internal pemerintah ataupun seleksi politik, tidak benar-benar teruji rekam jejaknya. Proses seleksi yang koruptif, disertai dengan praktek penyuapan antara kandidat dan pemegang otoritas, membuat *merit system* sebagai prinsip dalam seleksi, kaderisasi, mutasi, dan promosi pejabat negara tidak dipertimbangkan sama sekali. Bisa dikatakan, korupsi di sektor hilir adalah konsekuensi dari korupsi yang terjadi di sektor hulu. Karena itu, ICW melihat seleksi pejabat publik sebagai ranah strategis yang harus diawasi. Selama 2017, ICW melakukan pengawasan pada beberapa seleksi pejabat publik, baik seleksi pejabat politik maupun seleksi pejabat negara lainnya.

Debat Cagub Cawagub provinsi Banten yang diselenggarakan ICW dan komunitas pemuda Banten yang tergabung dalam AYO BANTEN
Dokumentasi: ICW

BERGERAK MEMANTAU PILKADA PROVINSI BANTEN

Pada Februari 2017, Banten menggelar Pilkada bersama dengan 100 daerah lainnya. Pilkada tersebut diikuti dua pasang calon, yaitu Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarif. Dalam catatan ICW, Pilkada Banten kerap dibajak aneka pelanggaran. Mulai dari jual-beli suara, pelanggaran pemasangan atribut kampanye, politisasi Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga penggunaan anggaran atau program pemerintah untuk upaya kemenangan. Pada Pemilu Legislatif 2014 misalnya, pemantau ICW melaporkan sedikitnya 36 pelanggaran pemilu di Banten. Jumlah tersebut merupakan jumlah terbanyak dibanding pemantauan di provinsi lainnya. Tidak mengherankan apabila Bawaslu kemudian menempatkan Pilkada Banten 2017 sebagai salah satu Pilkada yang rawan.

Berangkat dari pemetaan masalah korupsi dan pemilu di Banten, ICW mengajak komunitas-komunitas muda di Banten untuk membentuk gerakan pemantauan. Diharapkan, potensi pelanggaran Pilkada Banten dapat dicegah dan proses Pilkada pun terawasi oleh masyarakat.

Tercatat, 100 pemantau dari lintas kampus dan lintas komunitas, seperti Pemuda Muhammadiyah, *Tangerang Public Transparency Watch* (TRUTH), Serikat Guru Tangerang (SGT), dan Nalar Pandeglang, tergabung dalam gerakan pemantauan yang kemudian disebut AYO BANTEN.

AYO BANTEN fokus pada dua kegiatan utama, yaitu pemantauan dan edukasi pemilih. Pemantauan dilakukan di enam kabupaten/ kota, yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Pandeglang, Tangerang Selatan, dan Cilegon. Sedangkan edukasi yang dilakukan misalnya mengajak pemilih lebih mengenali *track record*, visi, misi, dan program calon, menolak politik uang, serta melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan menggelar berbagai acara, seperti panggung seruan dalam acara *car free day*, produksi *leaflet* edukatif, diskusi media, hingga debat calon kepala daerah. Dalam acara itu, agenda dan komitmen antikorupsi calon diadu secara terbuka.

Pemantau AYO BANTEN melaporkan sedikitnya 174 dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu Banten. Mayoritas laporan mengenai pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye. Laporan tersebut umumnya ditindaklanjuti, mengingat AYO BANTEN aktif menanyakan progres laporan

dan secara rutin menggelar diskusi media. Dua cara ini dinilai cukup ampuh dalam mengadvokasi laporan.

AYO BANTEN juga menerima aduan dari masyarakat mengenai pelanggaran pemilu. Salah satu aduan yang kami terima dan advokasi bersama yaitu adanya dugaan politik uang yang dilakukan oleh tim Andika Hazrumy saat berkampanye di Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang. Mengecewakan, Bawaslu Banten memutuskan tidak menaikkan dugaan politik uang tersebut ke tahap penyidikan. Bawaslu mengaku kesulitan menemukan alat bukti dan mencari pelaku politik uang.

Paska Pilkada Banten 2017, pemantau-pemantau AYO BANTEN menyadari bahwa tugas mengawal Banten belum selesai. Ada agenda lanjutan yang tidak kalah penting, yaitu mengawal pemerintahan Banten dan menagih janji Wahidin Halim-Andika Hazrumy, pemenang Pilkada Banten 2017.

Hingga saat ini, pemantau AYO BANTEN yang kini tergabung dalam komunitas BANTEN BERSIH terus meningkatkan kapasitas dalam mengawal Banten. Salah satunya adalah belajar menganalisis APBD dan memantau pengadaan barang dan jasa. Dalam waktu dekat, para pemantau juga berencana memantau Pilkada di 4 Kabupaten/ Kota di Banten.

MEMANTAU SELEKSI CALON ANGGOTA KPU DAN BAWASLU

Dalam rangka menelusuri rekam jejak calon anggota KPU dan Bawaslu dan memberikan masukan kepada Tim Seleksi (Timsel) atas temuan rekam jejak tersebut, Koalisi Pemilu Berintegritas yang terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Konstitusi dan Demokarasi (KoDe) Inisiatif, Jaringan Pendidikan dan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) melakukan pemantauan terhadap seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu untuk periode 2017-2022.

Pemantauan ini merupakan upaya untuk memastikan calon anggota KPU dan Bawaslu tidak mempunyai rekam jejak bermasalah atau berpotensi bermasalah dalam menyelenggarakan pemilu.

Metode yang dilakukan untuk memberikan masukan kepada Timsel mengenai rekam jejak calon adalah dengan cara melakukan penelusuran rekam jejak atau *tracking*. Metode ini dimaksudkan untuk menilai secara mendalam mengenai profil dan rekam jejak calon yang bersangkutan.

Didalam melakukan seleksi calon Komisioner KPU dan BAWASLU Republik Indonesia, penelusuran rekam jejak adalah bagian yang sangat penting. Kami sangat terbantu oleh ICW dan Koalisi Pemilu Berintegritas yang telah memberikan laporan yang lengkap dan sistematis, sehingga sangat memudahkan kami, para anggota tim seleksi. Laporan tersebut kami gunakan sebagai bahan interview, sehingga kami mendapatkan gambaran yang lengkap untuk menilai para calon.

Betti Alisjahbana
Panseleksi KPU-Bawaslu 2017-2022

Penelusuran rekam jejak terhadap 34 orang calon anggota KPU dan 16 orang calon anggota Bawaslu. Adapapun jangka waktu penelusuran yang dilakukan oleh koalisi adalah terhitung sejak tanggal 6-17 Januari 2017.

Dalam penelusuran rekam jejak kandidat, Koalisi menggunakan 3 (tiga) indikator utama yang meliputi aspek integritas, independensi dan pengetahuan/pemahaman tentang Kepemiluan. Dari tiga indikator tersebut, tanpa mengintervensi kewenangan Timsel dalam memilih kandidat, Koalisi melakukan *clustering* kandidat dalam 3 corak warna untuk memudahkan pemetaan yakni hijau, kuning, dan merah. Warna hijau berarti kandidat tersebut direkomendasikan oleh koalisi dan sebaliknya warna merah berarti tidak layak untuk dipilih oleh pansel. Sementara itu, warna kuning berarti Timsel harus berhati-hati dan agar dilakukan pendalaman kepada kandidat.

Dari hasil penelusuran rekam jejak hingga tahapan wawancara akhir oleh Timsel, terpilihlah 7 komisioner untuk KPU dan 5 komisioner untuk Bawaslu. Koalisi melihat bahwa Timsel cukup partisipatif dan terbuka dalam setiap tahapan proses seleksi. Berbagai masukan masyarakat juga diakomodasi oleh pansel khususnya pada tahapan wawancara dimana berbagai temuan atas penelusuran rekam jejak kandidat sebagian besarnya diklarifikasi kepada kandidat dalam tahapan wawancara.

Dari agenda ini, hasilnya sangat positif dimana seluruh calon yang terpilih sebagai anggota Bawaslu keseluruhannya merupakan calon yang direkomendasikan oleh Koalisi. Sementara dalam konteks KPU hasilnya juga positif karena dari tujuh Komisioner terpilih, enam diantaranya merupakan calon yang direkomendasikan oleh Koalisi.

Selain penelusuran rekam jejak, Koalisi juga melakukan survei *opinion maker* yang berasal dari *stakeholders* pemilu untuk menilai kinerja KPU dan Bawaslu periode 2012-2017. Tujuan dari survei ini untuk menilai kinerja dan pencapaian dua lembaga penyelenggara pemilu tersebut dan memetakan tantangan yang akan dihadapi. Sehingga hasil survei ini dapat dipergunakan sebagai acuan awal oleh Timsel untuk memetakan kebutuhan lembaga KPU-Bawaslu yang akan datang.

Terakhir, Koalisi juga menyelenggarakan diskusi media serta pemantauan tahapan akhir baik di Timsel dan Komisi II DPR RI yang melakukan *fit and proper test* para calon anggota KPU dan Bawaslu.

MENELUSURI REKAM JEJAK CALON HAKIM ADHOC TIPIKOR

Pada 2017, Mahkamah Agung (MA) kembali melibatkan ICW dan jaringan masyarakat sipil lainnya untuk mengawal dan melakukan penelusuran rekam jejak terhadap 72 calon hakim adhoc tipikor yang mendaftar. Dalam jangka waktu satu bulan, Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) dimana ICW termasuk di dalamnya, memberikan masukan terhadap seleksi tersebut. Masukan diberikan melalui penemuan penelusuran rekam jejak dan pengawalan sepanjang proses seleksi oleh Pansel di Gedung Diklat Mahkamah Agung di Megamendung.

Pelibatan CSO dalam proses seleksi hakim adhoc tipikor oleh MA bukanlah kali pertama. Setidaknya sudah tiga kali permintaan bantuan untuk melakukan *tracking* rekam jejak para kandidat diajukan MA, lengkap dengan data dan informasi para calon hakim adhoc tipikor. Atas dasar permohonan dan data tersebut, Koalisi bersama dengan mitra-mitra di daerah, melakukan penelusuran rekam jejak yang meliputi aspek integritas, pengetahuan teknis, kepribadian, jejak karir dan dilengkapi dengan wawancara secara resmi kepada para calon hakim itu.

Dalam melakukan wawancara, aspek yang dialami dari para kandidat adalah pengetahuan terkait kewenangan pengadilan tipikor, pemahaman calon atas UU Tipikor, serta tindak-tanduk pidana lain yang berkaitan dengan tipikor seperti tindak pidana pencucian uang. Selain itu, wawancara dilakukan untuk menggali pemahaman calon dalam soal hukum acara pidana, serta undang-undang terkait tindak pidana korupsi. Pada sisi integritas, penelusuran dilakukan dengan memeriksa kepatuhan calon dalam membayar pajak melalui penandatanganan formulir kesediaan membuka SPT Pajak dari calon yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemantauan Koalisi sepanjang proses seleksi, terdapat banyak temuan terkait para calon. Hal yang kerap menjadi temuan adalah banyaknya *jobseeker* yang mendaftar sebagai calon hakim adhoc tipikor, yang jika ditelusuri lebih jauh, tidak memiliki rekam jejak yang jelas, minim pengalaman, serta minim pengetahuan dan pemahaman terkait tindak pidana korupsi dan hukum pidana secara umum.

Pansel menjadikan hasil temuan dan pemantauan seleksi tersebut sebagai salah satu komponen yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Dalam seleksi calon hakim *adhoc tipikor* 2017, dari sekitar 72 pendaftar, ada 14 orang yang dinyatakan lolos sebagai hakim adhoc tipikor.



Gedung Mahkamah Agung
Dokumentasi: ICW

NOVEL BASWEDAN DAN MASYARAKAT SIPIL MELAWAN GELAP

Upaya pemberantasan korupsi, khususnya yang dilakukan oleh KPK, kerap mendapat perlawanan balik dari koruptor atau para kroninya. Perlawanan tersebut dapat hadir dalam bentuk Revisi UU KPK, Pansus Angket KPK, hingga penyerangan fisik terhadap aktivis antikorupsi, maupun terhadap pegawai KPK sendiri. Penyerangan terhadap Novel Baswedan adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap upaya pemberantasan korupsi tersebut. Penyerangan terhadap Novel tidak dapat dipandang sebagai serangan terhadap Novel Baswedan sebagai individu, tapi diduga kuat berkaitan dengan perkara yang sedang ditanganinya, sekaligus untuk memberikan teror kepada para pegiat anti korupsi. Itulah mengapa masyarakat sipil bereaksi keras untuk menuntut penuntasan perkara tersebut.

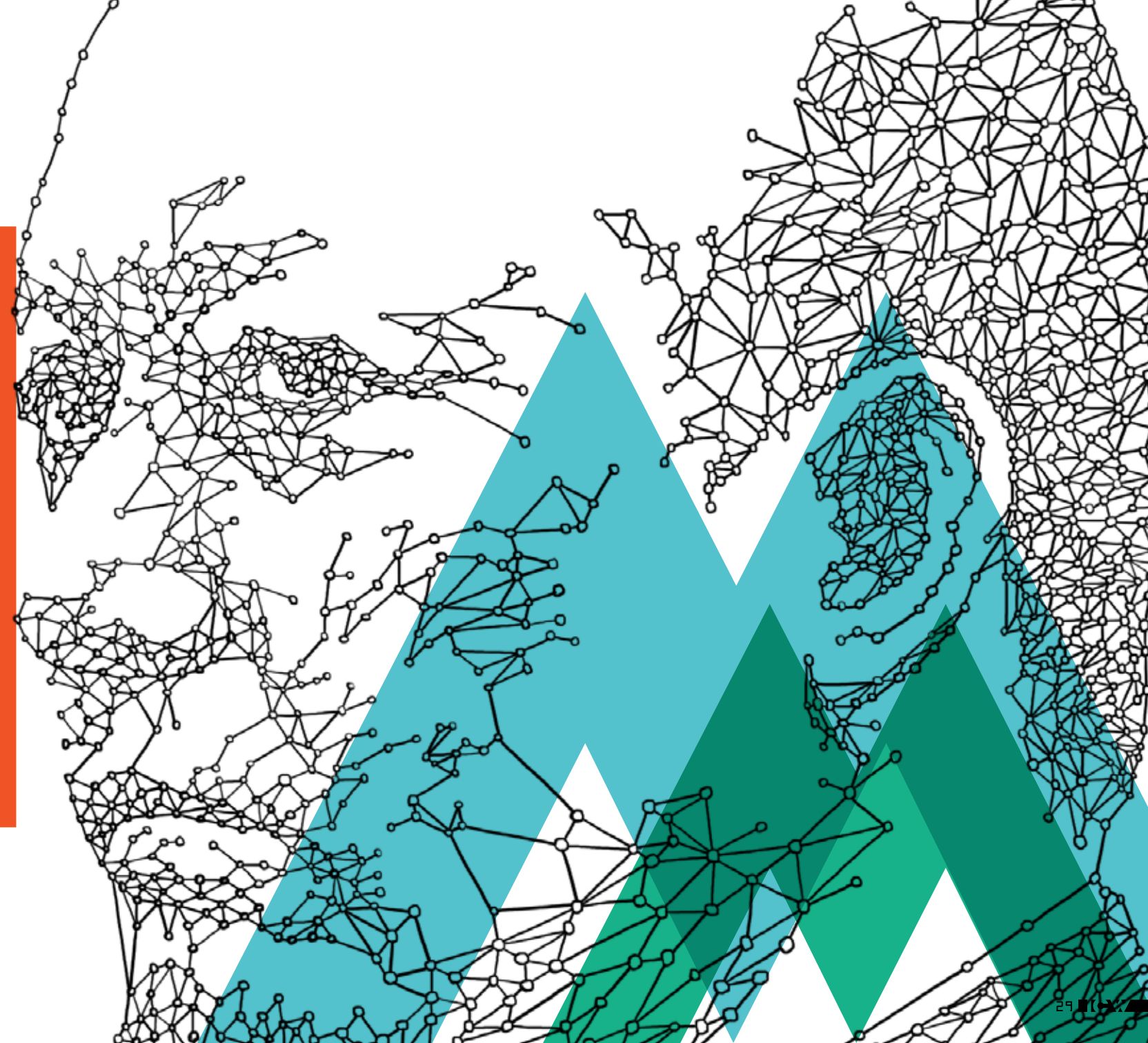
Dalam perkara penyerangan terhadap Penyidik Senior KPK Novel Baswedan, ICW bersama dengan Tim Kuasa Hukum dan Organisasi Masyarakat Sipil lain seperti KontraS, LBH Jakarta, YLBHI, dan Amnesty International Indonesia, aktif melakukan advokasi. Advokasi tersebut mulai dari mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), melakukan penggalangan dana publik, dan melakukan kampanye publik baik secara offline maupun on-line.

Terkait isu TGPF misalnya, Komnas HAM berinisiatif untuk mengambil peran tersebut berdasarkan fungsi investigasinya untuk memulai

penyelidikan terkait penyerangan, bersama dengan elemen independen dari masyarakat sipil. Di sisi lain, ICW bersama dengan Tempo berhasil menggalang dana dari publik sebesar 101 juta rupiah, melalui penjualan lukisan Novel Baswedan. Dalam hal kampanye publik online, pada 21 Februari 2018 tagar #SebelahMata dan #NovelKembali masuk ke dalam 5 topik unggulan (*Trending Topic*) di twitter.

Keberhasilan kampanye online ini juga tidak dapat dilepaskan dari sambutan Najwa Shihab yang turut mendukung kampanye lewat tagar #SebelahMata dan #NovelKembali. Di saat yang sama, grup musik independen Efek Rumah Kaca memberikan dukungan lewat izinnya menjadikan judul lagu dan lagu Sebelah Mata dijadikan topik kampanye, dan di-cover oleh publik luas. Selain itu, dukungan tersebut juga dilakukan di ranah off-line, di mana Efek Rumah Kaca mengisi pentas musik di halaman gedung KPK, di hari kepulangan Novel Baswedan ke Indonesia pada 22 Februari 2018.

Karya Kendra Paramita yang disumbangkan untuk kegiatan penggalangan dana publik ICW Dokumentasi: ICW



PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI



Karya Yulian yang disumbangkan untuk kegiatan penggalangan dana publik ICW
Dokumentasi: ICW

Sejak tahun 2010 lalu ICW telah memfasilitasi peran serta masyarakat, baik melalui kegiatan pelatihan, penguatan kapasitas, pembentukan organ baru (CSO) antikorupsi di berbagai daerah, serta ajakan berpartisipasi melalui donasi publik dan dukungan moril untuk terlibat dalam gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh ICW.

MENGALANG DUKUNGAN PUBLIK UNTUK KEBERLANJUTAN GERAKAN ANTI KORUPSI

Untuk memantapkan dukungan publik yang semakin luas terhadap gerakan antikorupsi, pada tahun 2017, ICW mendorong penggalangan dana publik melalui strategi donasi secara rutin atau sekali waktu melalui auto debet perbankan, donasi khusus untuk Sekolah Anti Korupsi (SAKTI), penjualan *merchandise*, kegiatan workshop berbayar dan lelang malam karya seniman. Dari semua upaya tersebut, total donasi publik ICW yang berhasil dikumpulkan hingga 27 Desember 2017 mencapai Rp 1.117.506.676.

Secara garis besar pencapaian donasi publik yang diraih pada tahun 2017 melebihi dari target yang ditentukan yaitu sebesar Rp 600 juta. Perolehan pada tahun 2017 adalah tertinggi yang didapat sejak ICW memulai melakukan upaya penggalangan dana publik pada tahun 2010.

ICW juga menggunakan pendekatan program donasi atau donasi tematik untuk menggalang dukungan publik. Selain SAKTI ada juga dirancang program donasi tematik yaitu Miskinkan Koruptor, Demokrasi Tanpa Korupsi, Bongkar Kasus Korupsi, dan Hutan Lestari Tanpa Korupsi. Selain itu website sahabaticw.org juga berupaya mengajak keterlibatan masyarakat yang memiliki komitmen antikorupsi menjadi sukarelawan (*volunteer*) dan membantu dalam penyebaran media kampanye antikorupsi. Produk-produk *merchandise* ICW tersedia juga tersedia dalam website sahabaticw.org ini.

Upaya menjaring dan merawat supporter atau sahabat ICW terus dilakukan dengan melakukan sejumlah strategi atau pendekatan. Selama tahun 2017 setidaknya ada 210 supporter yang masih aktif berdonasi rutin setiap bulannya melalui

auto debet dan terdapat sedikitnya 356 orang yang menjadi supporter baru di ICW melalui donasi publik, donasi karya dan pembelian merchandise ICW.

Selain berdonasi uang, ICW juga menerima donasi dalam bentuk karya. Donasi karya ini merupakan donasi dari seniman dalam bentuk karya atau desain yang diterima oleh ICW kemudian akan diadaptasi dalam berbagai bentuk barang. Misalnya saja dalam *merchandise* T-Shirt, Hoodie, Sweater, Mug, Totebag, dan Topi lalu dijual kepada publik. Selain untuk menambah donasi dalam penjualan karena para seniman biasanya memiliki fans yang fanatik, hal ini juga dilakukan agar lebih banyak seniman yang terlibat dalam gerakan antikorupsi.

Pada tahun 2017, terdapat sebelas seniman yang telah dan berkomitmen mendonasikan karyanya untuk membantu gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh ICW. Donasi karya tersebut diadaptasi pada *merchandise*, lukisan, patung dan

kepentingan pendanaan SAKTI, dirancang sebuah Program Donasi khusus SAKTI 2017. Program ini sekaligus perwujudan ICW dalam mendekati isu korupsi dan menggalang dukungan publik dengan lebih nyata.

Program penggalangan dana SAKTI 2017 menargetkan donatur dari individu dan korporasi. Strategi atau pendekatan penggalangan dana SAKTI dilakukan dengan cara antara lain pembuatan dan presentasi proposal (khusus bagi individu dan juga korporasi), menyelenggarakan makan malam penggalangan dana, membuka kanal donasi online (Kitabisa.com), pembuatan video testimoni ajakan berdonasi dari *public figure*, pembuatan poster ajakan donasi, kampanye berdonasi melalui *talkshow* bersama Slank dan Radio Jak FM, termasuk pemanfaatan media sosial milik ICW.

Dengan berbagai upaya pengalangan dana yang dilakukan - dari target dana kegiatan SAKTI 2017 yaitu Rp 400.000.000,-

PENERIMAAN DONASI PUBLIK ICW 2010 - 2017



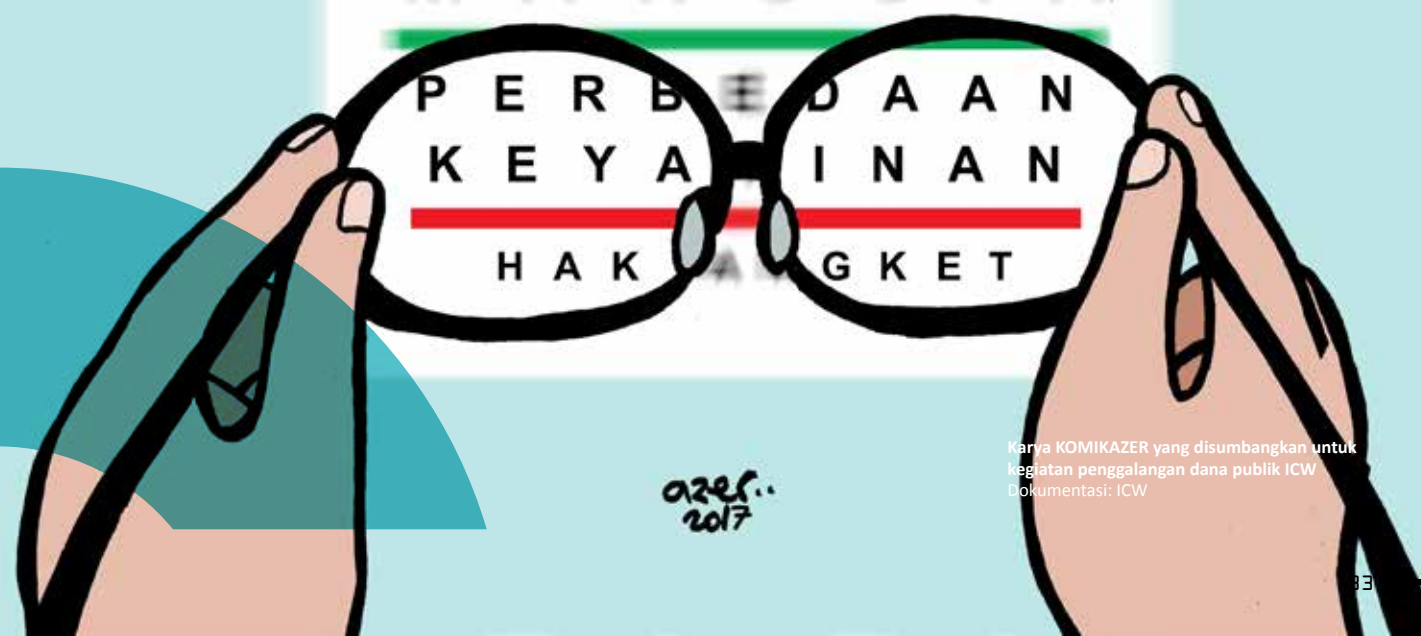
poster kampanye ICW. Mereka terdiri dari tujuh seniman yang mendesain *merchandise* ICW yaitu Vembi, Kendra Paramitha, Alit Ambara, The Popo, Mice Cartoon, Yulian Ardhi, dan Komikazer. Satu seniman memberikan karya dalam bentuk lukisan, Malela Mahargasarie dan seorang seniman yang memberikan karya untuk keperluan kampanye ICW yaitu Farhan Facil. Selain itu terdapat dua seniman ternama yang sudah berkomitmen memberikan karyanya kepada ICW berupa patung dari I Nyoman Nuarta dan lukisan dari Kemal Zedine.

Tahun 2017 merupakan tahun uji coba penyelenggaraan Sekolah Antikorupsi (SAKTI) ICW yang seluruh pendanaannya berasal dari donasi publik, bukan dari lembaga donor. Untuk

pada akhirnya terkumpul donasi sebesar Rp. 454.000.020,-. Jumlah tersebut berasal dari donasi 34 orang individu sebesar Rp. 237.500.001 dan 7 Korporasi yang terkumpul sebesar Rp. 216.500.019. Dengan perolehan dana tersebut, kegiatan SAKTI 2017 pada akhirnya dapat terlaksana pada 1-10 Agustus 2017.

Selain difokuskan untuk kegiatan SAKTI 2017, dana publik juga digunakan untuk kegiatan advokasi atau kampanye antikorupsi. Pada tahun 2017 terdapat dua program advokasi ICW yang didukung oleh dana publik. *Pertama*, monitoring persidangan kasus korupsi proyek E-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun. *Kedua*, penelusuran rekam jejak calon hakim

K
O
R
U
P
S
I
H
A
K
A
S
A
S
I
M
A
N
U
S
I
A



azer.
2017

Karya KOMIKAZER yang disumbangkan untuk kegiatan penggalangan dana publik ICW Dokumentasi: ICW



Karya Alit Ambara yang disumbangkan untuk kegiatan penggalangan dana publik ICW
Dokumentasi: ICW

Mahkamah Konstitusi 2017 yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi dari Pemerintah. Proses pengawalan seleksi calon ini dinilai berhasil karena akhirnya Pemerintah memilih Saldi Isra (Guru Besar Hukum Universitas Andalas) sebagai hakim Mahkamah Konstitusi.

Selain kedua aktivitas tersebut, dana publik ICW digunakan untuk mendukung kegiatan advokasi dan kampanye ICW yang dilaksanakan pada tahun 2017. Kegiatan tersebut antara lain untuk pemilihan Tokoh Publik Antikorupsi 2017, rangkaian kegiatan Hari Antikorupsi 2017, diskusi atau Ngobrol Santia Antikorupsi (NGOBRAS), dan kampanye melawan pelemahan KPK.

Selain donasi uang dan donasi karya, pelibatan partisipasi masyarakat dalam mengkampanyekan gerakan antikorupsi, salah satunya melalui dukungan dari publik figur. Harapan yang ingin dicapai adalah bahwa publik figur tersebut bisa turut serta mengkampanyekan penggalangan dana publik ICW dan isu pemberantasan korupsi melalui media sosial. Dengan begitu isu antikorupsi semakin memiliki daya jangkauan yang luas di masyarakat.

Sepanjang tahun 2017 ICW berhasil mengajak 23 publik figur untuk menyuarakan isu antikorupsi. Tahun ini pun sedikit berbeda dibanding tahun sebelumnya, untuk publik figur kali ini berasal dari beragam profesi, tidak hanya dari kalangan selebritis melainkan akademisi, pengusaha, dan seniman turut serta dalam kegiatan kampanye ini. Nantinya video mereka yang sudah diambil telah dipublikasikan di media sosial ICW (instagram/twitter/facebook).

Berikut nama-nama publik figur yang telah mendukung ICW di tahun 2017: Mahfud MD (Ketua APHTN); Tsamara Amany (Politisi Muda PSI); Ira Koesno (Anchor); Ronal dan Tike (Penyiar Radio); Okky Madasari (Penulis); Prastowo (Praktisi Pajak); Romo Benny (Budayawan); J Kristiadi (Peneliti CSIS); Febri Diansyah (Juru Bicara KPK); Prof Hibnu Nugroho (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Soedirman); Nabila Putri (Selebritis); Feri Maryadi (Selebritis); Omesh (Selebritis); Giring Ganesha (Selebritis/Politisi Muda PSI); Cameo Project (Youtuber); Wisnu Utama (CEO Net TV); Alfito Dhenova (Anchor); Asep Iwan Iriawan (Akademisi); Burhanudin Muhtadi (Pengamat Politik); Yunarto Wijaya (Pengamat Politik); The Popo (Seniman); Indro Warkop (Selebritis); dan Komik Azer (Seniman).

Donasi saya setiap bulan untuk Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat kecil, tetapi maknanya bagi hati sanubari sangat penting karena mengandung harapan untuk dapat ikut merawat kehadiran organisasi ini. Saya selama ini terus mengamati upaya-upaya ICW yang tak pernah lelah untuk mendorong kegiatan pemberantasan korupsi di Tanah Air.

Jaringan ICW perlu diperkuat dan dibangun seluas mungkin di Indonesia sehingga programnya semakin dipahami oleh publik yang kian jenuh dengan gangguan korupsi ketika memerlukan pelayanan dari lembaga Negara.

Atmakusumah Astraatmadja Pengajar Etika dan Hukum Pers di Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) di Jakarta; Ketua Dewan Pers periode 2000-2003



Penyerahan plakat kepada Najwa Shihab dalam penobatan Tokoh Antikorupsi 2017
Dokumentasi: ICW

PENOBATAN TOKOH PUBLIKANTI KORUPSI 2017

Tahun 2017 menjadi fase awal bagi ICW untuk mendaulat seseorang sebagai Duta Antikorupsi yang kemudian berubah menjadi Tokoh Publik (*public figure*) Antikorupsi. Harapannya, tokoh publik yang terpilih bisa menyebarkan pesan-pesan antikorupsi kepada masyarakat luas. Setidaknya juga bisa menjadi contoh serta panutan bagi masyarakat untuk terus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas. Indikator atau kriteria yang digunakan dalam memilih kandidat tokoh publik antikorupsi 2017 adalah berintegritas, rekam jejak atau kepedulian dengan isu korupsi, memiliki pengaruh yang luas, artikulatif serta komunikatif dan dapat diterima semua kalangan.

Proses pemilihan tokoh publik antikorupsi 2017 yang diselenggarakan oleh ICW dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi seperti studi banding, penyusunan kerangka acuan kegiatan, penjaringan Panitia Seleksi, pengumpulan nama-

nama kandidat, proses seleksi, pengumuman dan akhirnya pemberian penghargaan. Demi menjaga objektivitas penilaian, ICW juga melibatkan Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari individu-individu yang kredibel seperti Dr Zainal Arifin Mochtar S.H., LL.M (Akademisi Fakultas Hukum dan Ketua Pusat Kajian Antikorupsi UGM), Ir Betty Alisjahbana (Panitia Seleksi Komisioner KPK 2015-2019), dan Budi Setyarso (Pemimpin Redaksi Harian TEMPO).

Setelah menjalani beberapa tahapan seleksi, dan menjaring dari 44 nama tokoh publik yang diusulkan, akhirnya ICW dan Pansel memilih Najwa Shihab sebagai tokoh publik antikorupsi 2017. Pilihan ini didasarkan atas kiprah Najwa Shihab yang memiliki jiwa sosial tinggi, paham dengan kondisi Indonesia saat ini khususnya persoalan korupsi serta merupakan representasi generasi muda. Selain itu sepanjang tahun 2017, ICW juga melihat Najwa Shihab aktif mensuarakan persoalan pemberantasan korupsi dan kampanye antikorupsi melalui pekerjaannya selama ini.





PENGUATAN KAPASITAS JARINGAN ANTIKORUPSI

Untuk menjaga konsistensi gerakan anti korupsi di berbagai wilayah di Indonesia, ICW memiliki komitmen untuk merawat serta memperkuat jaringan kerja anti korupsi melalui berbagai macam pendekatan. Strategi pelatihan dan pendampingan dilakukan guna memperkuat posisi tawar CSO lokal, sekaligus memperkuat kapasitas mereka dalam melakukan kerja-kerja advokasi anti korupsi.

MEMPERKUAT KAPASITAS ORGANISASI JARINGAN ANTI KORUPSI

ICW memberikan fasilitas bagi jaringan kerja antikorupsi di daerah untuk memperkuat aspek kelembagaan, kemampuan teknis, dan kemampuan finansial melalui berbagai kegiatan pelatihan dan pendampingan. Salah satu yang telah dilakukan pada tahun 2017 adalah fasilitasi pelaksanaan *Strategic Plan (SP)* Sahdar di Medan, Sumatera Utara. Sahdar merupakan jaringan kerja ICW yang fokus pada advokasi pelayanan publik dasar sektor pendidikan. Selama 3 hari, dua anggota Badan Pekerja ICW mendampingi dan memfasilitasi proses SP sehingga terbentuk produk perencanaan strategis yang lebih terarah, kontekstual, dan memperhitungkan tantangan baru yang dihadapi.

MEMPERKUAT KAPASITAS ADVOKASI JARINGAN ANTI KORUPSI

Pada tahun 2017, ICW telah menyelenggarakan berbagai macam pelatihan, baik yang merupakan bagian dari inisiatif jaringan kerja daerah maupun agenda yang disusun oleh ICW. Berbagai pelatihan yang telah dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. KRPK di Blitar : Training Sekolah Kader Antikorupsi
2. Jambi : Training Monitoring Penerimaan Sektor Sumber Daya Alam dalam APBD
3. Mata Aceh di Banda Aceh : Training Pemantauan Penerimaan SDA dalam APBD
4. PUSPAHAM Kendari : Training Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan Opentender.net
5. YASMIB Sulawesi Selatan : Training Pemantauan Pengadaan Barang dan Jasa dengan menggunakan Opentender.net
6. Truth Tangerang Selatan : Training Bedah APBD
7. Jaringan Nasional Antikorupsi : Training Pemantauan BPJS
8. Jaringan Nasional Antikorupsi : Training Pemantauan Dana Desa

MAINSTREAMING AGENDA ANTIKORUPSI DENGAN ORMAS KEAGAMAAN

Sebagai upaya memperluas gerakan antikorupsi, ICW melakukan kerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat berbasis keagamaan. Ormas keagamaan dipandang memiliki kekuatan besar untuk melakukan *pressure* terhadap pemerintah, sekaligus mendorong gerakan antikorupsi di internal organisasi mereka sendiri.

Selama 2017, beberapa ormas keagamaan yang intens berinteraksi dan bersinergi bersama untuk agenda anti korupsi adalah Pemuda Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Kampus Universitas Naaahdlatul Ulama (UNUSIA). Beberapa kegiatan bersama telah dilakukan, misalnya dengan menyelenggarakan Madrasah Anti Korupsi (MAK) dengan Pemuda Muhammadiyah, diskusi dan kajian bersama Pusat Kajian Antikorupsi (PUSDAK) Unusia dan penyusunan modul “Gereja Melawan Korupsi” atas inisiatif Persekutuan Gereja Indonesia (PGI).

Dalam membangun kapasitas organisasi, intens telah dilakukan ICW terhadap SAHDAR sebagai mitra sejak tahun 2006, seperti pemantauan peradilan, investigasi kasus, menjadi fasilitator dalam membangun tata kelola pendidikan dan pengembangan komunitas. Dan terlibat dalam advokasi kasus mega korupsi Bansos Jilid Satu dan Bansos Jilid Dua yang merugikan keuangan negara hingga dua triliun rupiah.

Arif Faisal -
Koordinator SAHDAR
Medan



ICW berkomitmen untuk terus memperkuat kelembagaan internal organisasi guna mengefektifkan gerakan anti korupsi. Dengan organisasi yang kuat, diharapkan *indurance* untuk melakukan advokasi anti korupsi akan lebih berkelanjutan. Selain terciptanya tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel mengingat ICW bergerak pada ranah anti korupsi.

PENGUATAN INTERNAL ORGANISASI

MODERNISASI SISTEM KEUANGAN: IKHTIAR MENINGKATKAN AKUNTABILITAS ORGANISASI

Untuk menciptakan tata kelola organisasi yang sehat, ICW selama 2017 melakukan upaya modernisasi sistem keuangan yang telah diinisiasi sejak 2016. Sistem keuangan yang telah digunakan oleh ICW selama ini bukannya rentan terhadap penyimpangan, namun demikian, ICW tetap mendorong semakin efektif dan efisiennya pengelolaan sumber daya organisasi melalui modernisasi sistem keuangan berbasis teknologi internet. ICW kini telah menerapkan pola pengajuan anggaran online, pencatatan pelaporan keuangan online serta transaksi keuangan online. Proses ini masih belum selesai karena tahun 2017 merupakan rangkaian uji coba sistem keuangan baru yang masih butuh revisi dan adaptasi.

PENGEMBANGAN KAPASITAS STAFF ICW

Mengingat tantangan jaman yang terus berubah, ICW mendorong para staff ICW untuk terus memperkuat kapasitas individu. Semakin baiknya kemampuan individu dalam menjalankan tugas akan menyokong kerja-kerja antikorupsi

Terhitung sejak saya bergabung di ICW, saya sudah mengikuti dua kali pelatihan menulis yang diadakan oleh ICW.

Setidaknya pelatihan ini membantu konstruksi berpikir saya untuk lebih sistematis dalam menghasilkan sebuah tulisan. Pada akhirnya kedua pelatihan ini sangat berkontribusi besar terhadap tulisan-tulisan saya yang beberapa kali masuk dalam media-media nasional, seperti harian Kompas, TEMPO, dan Jawa Pos.

-Kurnia Ramadhana- Staff
Penggalangan Dana Publik
ICW

yang lebih efektif. Di antara hal yang telah dilakukan selama 2017 adalah kegiatan diskusi internal mingguan dimana pemateri dalam setiap diskusi berasal dari staff internal ICW sendiri. Kegiatan diskusi internal mingguan ini bertujuan untuk merangsang keinginan staff ICW untuk membaca dan belajar berbagai konsep dan perkembangan penelitian mengenai isu korupsi dan antikorupsi secara global.

Selain itu, ICW menargetkan peningkatan kemampuan kapasitas staff ICW dalam berbagai fungsi dan kerja utama kelembagaan. Diantaranya yang telah dilakukan adalah pelatihan pemanfaatan media sosial untuk kampanye dan advokasi antikorupsi, pelatihan manajemen organisasi yang diselenggarakan oleh DANIDA dan Ford Foundation, pelatihan pajak khusus untuk tim keuangan ICW, dan pelatihan menulis opini untuk staff ICW. Hasilnya, kampanye di akun media sosial ICW lebih terstruktur, staff ICW lebih intens untuk menulis artikel opini di berbagai media massa nasional, serta pengurusan pajak yang lebih cepat dan efektif.

Demikian pula, kegiatan penguatan kapasitas lain yang dilakukan adalah kemampuan bahasa asing, terutama Bahasa Inggris. ICW menyadari bahwa tugas-tugas ICW banyak yang berkaitan dengan berbagai pihak, termasuk kalangan internasional, baik mereka sebagai donor, perwakilan pemerintahan negara lain, perguruan tinggi luar negeri, peneliti, jurnalis, dan lain sebagainya. Di samping itu, karena ICW telah dikenal luas, berbagai macam undangan diskusi, seminar internasional dan pelatihan di luar negeri kerap dialamatkan kepada ICW. Maka dari itu, dibutuhkan kesiapan staff ICW untuk bisa membawakan ide-ide dan informasi mengenai kerja-kerja ICW di kancah global, termasuk menjadi bagian dari peserta pelatihan antikorupsi berskala global.

PENYUSUNAN UKURAN KINERJA STAFF

Untuk membuat proses pengambilan keputusan organisasi menjadi lebih objektif, ICW telah menyusun ukuran kinerja staff dimana berbagai macam indikator disusun guna menilai kinerja masing-masing staff selama kurun waktu satu tahun. Indikator kinerja staff ini melengkapi instrumen *timesheet* yang telah diberlakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan indikator kinerja staff, manajemen ICW dapat mengambil keputusan untuk menilai, mengevaluasi dan mengarahkan staff, khususnya staff yang belum menjadi anggota Badan Pekerja ICW untuk lebih meningkatkan kinerja mereka pada periode paska evaluasi. Ukuran kinerja staff juga dimanfaatkan untuk memberikan kepastian apakah staff di ICW dapat diangkat menjadi anggota Badan Pekerja atau tidak.



Salah satu peserta SAKTI John Nehemia saat mengikuti kegiatan pendidikan di Taman Safari Indonesia
Dokumentasi: ICW

Dengan ilmu yang saya dapatkan lewat SAKTI, saat ini saya melakukan pengawasan kepatuhan dana desa di Kabupaten Biak Numfor, Distrik Samofa. Ada 3 kampung yang dipantau, yakni Kampung Kamorfuar, Kampung Maryendi, dan Kampung Adainasosen.

-John Nehemia Mandibo,
Mahasiswa Universitas
Sains Teknologi
Jayapura-Papua

PENDIDIKAN WARGA

Motto ICW adalah bersama rakyat memberantas korupsi. Ini berarti ICW yakin bahwa pemberantasan korupsi yang efektif hanya akan mungkin jika warga berdaya dan bergerak bersama untuk melawan korupsi. Posisi warga yang sentral dalam pemberantasan korupsi juga mengingat posisi mereka sebagai korban korupsi. Oleh karena itu, ICW selalu menempatkan agenda kerja antikorupsi pada penguatan warga melalui berbagai strategi edukasi.

SEKOLAH ANTIKORUPSI (SAKTI) 2017

Salah satu fokus ICW dalam tahun 2017 adalah memperluas kader muda antikorupsi. Untuk mencapai hal tersebut, ICW merancang program pendidikan kader antikorupsi melalui SAKTI. Program SAKTI sendiri merupakan agenda kelembagaan ICW yang diselenggarakan dua tahun sekali. Program SAKTI 2017 merupakan kegiatan pelatihan jilid 3 sejak program ini dilaksanakan pada tahun 2013.

SAKTI 2017 diikuti oleh para mahasiswa yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Medan, Padang, Riau, Jakarta, Bandung, Jogjakarta, Surabaya, Blitar, Jember, Makasar, Palu, Pontianak, Samarinda dan Papua. Keterwakilan peserta dari beberapa daerah memang menjadi prioritas dalam pelaksanaan SAKTI 2017. Hal ini dimaksudkan untuk pemerataan kesempatan bagi anak muda yang memiliki komitmen terhadap gerakan antikorupsi. Harapannya, setelah mengikuti program SAKTI, mereka akan menjadi inisiator gerakan antikorupsi di daerahnya masing-masing.

Sebagai pendidikan kader antikorupsi, program SAKTI dirancang dengan materi-materi untuk penguatan pemahaman atas konsep, teori antikorupsi dan kemampuan teknis sebagai aktivis antikorupsi. Berbagai materi yang disediakan antara lain *Good Governance*, Analisis Sosial, Sosiologi Korupsi, Korupsi dalam Perspektif Hukum, Sistem Hukum di Indonesia, Gender dan Korupsi, Analisis APBD, Teknik Investigasi dan Teknik Citizen Report Card (CRC)

Setelah pelaksanaan SAKTI 2017, terdapat rangkaian rencana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh seluruh peserta. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan oleh peserta SAKTI, diantaranya melaksanakan kajian dan diskusi publik antikorupsi di masing-masing komunitas, membuat dongeng antikorupsi untuk anak-anak, membuat lomba cerpen antikorupsi, melakukan pemantauan dana desa dan kampanye jurnalisme kampus antikorupsi.

MENGGAGAS AKADEMI ANTIKORUPSI

ICW memanfaatkan perkembangan teknologi internet dengan menggagas akademi antikorupsi, sebuah pelatihan jarak jauh (*e-learning*) yang dengannya, memudahkan masyarakat yang tertarik untuk belajar, mendalami dan terlibat dalam agenda antikorupsi untuk mengakses sumber pengetahuan antikorupsi. Akademi Antikorupsi dirancang guna mengatasi dua persoalan, yakni daya jangkau serta sumber daya uang. Dengan *e-learning* yang dikembangkan ICW, diharapkan peserta akademi antikorupsi akan lebih luas dibandingkan ketika ICW melakukan kegiatan pelatihan secara *offline*. Demikian halnya, pelatihan *online* melalui *e-learning* akan memangkas secara signifikan biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan pelatihan anti korupsi.

Akademi Antikorupsi telah menyelesaikan 6 (enam) kursus utama, yakni Pengantar Anti Korupsi Pemula, Pengantar Anti Korupsi untuk Umum, Kemiskinan dan Korupsi, Korupsi dalam Perspektif Hukum, Sosiologi Korupsi, Pedagogi Kritis dan Pendidikan Anti Korupsi. Setiap kursus yang ditawarkan terdiri dari 6 hingga 14 modul.

Selain pengajar dari internal ICW, Akademi Antikorupsi juga melibatkan para pengajar tamu seperti Muthia Gani Rochman, PhD (dosen sosiologi korupsi di Universitas Indonesia), Bambang Wijojanto (mantan Pimpinan KPK), Dr. Surya Tjandra (dosen hukum Universitas Atma Jaya Jakarta), Rofikoh Rohim, PhD (dosen ekonomi dan bisnis Universitas Indonesia) serta Paku Utama, PhD (ahli pencucian uang dan korupsi).

Sampai saat ini Akademi Antikorupsi masih dalam proses penyelesaian *Learning Management System* (LMS) sehingga belum bisa dimanfaatkan secara resmi oleh masyarakat luas. Harapannya, pada pertengahan atau akhir Maret 2018, Akademi Antikorupsi secara resmi akan diluncurkan.

Tadinya saya pikir, kalau kerja dengan NGO pasti akan bosan, ternyata salah total. Bekerja dengan ICW sangat fun tapi tetap profesional dan terpercaya. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan selama berkoordinasi dengan ICW. Mereka membuktikan bahwa ilmu itu menjadi lebih berharga saat dibagikan.

Novia Firda Rozak
Staff PT DIGIMA ASIA



Kegiatan yang dilakuakn ICW bersama LKPP salah satunya adalah pelatihan penggunaan opentender.net untuk jurnalis
Dokumentasi: ICW

MEMPERKUAT KEMAUAN POLITIK NEGARA

Pemberantasan korupsi yang efektif hanya dapat terjadi ketika aktor negara memiliki kemauan politik yang besar untuk melakukannya. ICW mendorong aktor-aktor negara yang memiliki komitmen antikorupsi untuk melakukan kerja bersama melalui berbagai macam strategi dan skenario. Hal ini merupakan perspektif yang dikembangkan ICW untuk mempercepat hasil kerja pemberantasan korupsi.

MOU DENGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (LKPP)

Dalam mengembangkan instrumen opentender.net, ICW mendapatkan dukungan penuh dari LKPP. Dukungan ini berupa penyediaan data seluruh lelang elektronik yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Akses terhadap data-data tersebut telah berlangsung sejak 2013 pada saat ICW mengadakan MoU dengan LKPP untuk pertama kalinya. MoU ini kemudian diperbaharui setiap dua tahun sekali.

Pada 22 Mei 2017, ICW kembali melakukan perpanjangan MoU dengan LKPP yang berlaku hingga 2019 mendatang. Perpanjangan ini merupakan bentuk komitmen LKPP untuk menyediakan data lelang elektronik yang akan diolah dalam opentender.net. Selain itu, LKPP juga berharap semakin terbukanya data pengadaan maka akan semakin banyak partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Sehingga potensi kecurangan akan berkurang dan anggaran pemerintah menjadi lebih efisien.

Dalam perpanjangan MoU ini, kerja sama antara ICW dan LKPP diperluas. Jika sebelumnya lebih banyak dalam hal pertukaran data lelang elektronik, maka saat ini kerja sama juga dilakukan dalam hal membangun mekanisme *complaint* dan *feedback system* serta mengkampanyekannya kepada masyarakat.

AKTIVA

Aktiva Lancar	
Kas dan Setara Kas	Rp. 6.717.770.889
Piutang Karyawan	Rp. 1.112.082.683
Uang Muka & Beban Dibayar di Muka	Rp. 463.226.111
Piutang Program	Rp. 841.470.227
Jumlah Aktiva Lancar	Rp. 9.134.549.910
Aktiva Tetap	
Harga Perolehan	Rp. 8.307.621.094
Akumulasi Penyusutan	Rp. (1.412.554.586)
TOTAL AKTIVA	Rp. 16.029.616.418

KEWAJIBAN DAN AKTIVA BERSIH

Kewajiban	
Kewajiban Lancar	Rp. 3.853.895.239
Total Kewajiban	Rp. 3.853.895.239
Aktiva Bersih	
Tidak Terikat	Rp. 10.710.663.793
Terikat Kontemporer	Rp. 1.465.057.387
Total Aktiva Bersih	Rp. 12.175.721.180
TOTAL KEWAJIBAN DAN AKTIVA	Rp. 16.029.616.419

PENERIMAAN

Dana dari Grantor	Rp. 6.096.718.759
Dana Tidak Terikat	Rp. 4.523.081.774
Total Penerimaan	Rp. 10.619.800.533

PENGELUARAN

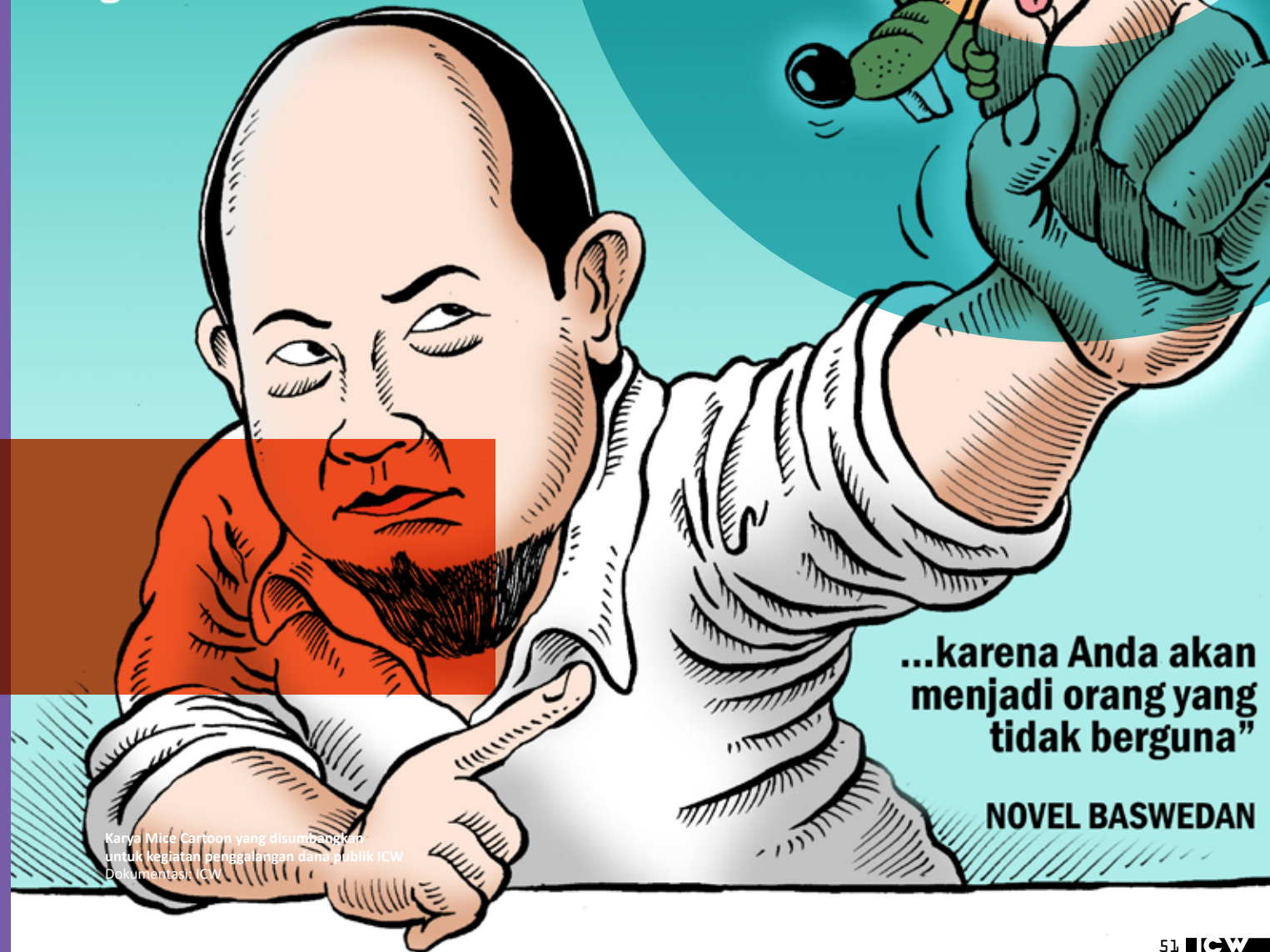
Program	Rp. 7.280.193.523
Pengembalian Dana	Rp. 620.946
Dana Tidak Terikat	Rp. 5.384.609.958
Total Pengeluaran	Rp. 12.665.424.427
Kenaikan/(Penurunan) Aktiva Bersih	Rp. (2.045.623.893)

No	PROGRAM	DONOR	NILAI
1	a. Membangun Gerakan Berjamaah Melawan Korupsi Melalui Madrasah Anti-Korupsi b. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Seleksi Hakim Ad Hoc Tipikor Tahun 2016	AIPJ (Cardno)	Rp. 221.415.761
2	Pemberdayaan Warga Dalam Mendorong Perbaikan Tata Kelola Desa serta Dampaknya terhadap Pelayanan Publik Bermutu Dan Berkeadilan Melalui Pusat Sumber Daya Warga (PSDW)	TIFA	Rp. 541.923.329
3	Program Kajian Regulasi Pendanaan Partai Politik di Indonesia	IFES	Rp. 302.768.861
4	Strengthened the CSO capacity to support stronger corruption prevention effort	MSI Cegah	Rp. 2.039.023.967
5	Tackling Corruption in Coal Industry	European Climate Foundation	Rp. 2.859.991
6	Improving the Governance of Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) in Indonesia Through Civil Society Participation (2016)	The Asia Foundation	Rp. 539.160.975
7	Improving the Governance of Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) in Indonesia Through Civil Society Participation (2017)	The Asia Foundation	Rp. 425.353.055
8	Core Support to ICW Strategic Plan 2014-2018	DANIDA	Rp. 1.070.117.946
9	Strengthening capacity of citizen to engage government in procurement monitoring and evaluation using open data analysis and spatial data visualization	HIVOS	Rp. 848.328.633
10	Partnership for Civic Engagement in Open Contracting	HIVOS	Rp. 105.766.241
TOTAL			Rp. 6.096.718.759



Ilustrasi keadaan hukum di Indonesia saat ini
Karya Aktivisual
Dokumentasi: ICW

“Berani itu tidak mengurangi umur,
takut juga tidak menambah umur.
Jadi, kita tidak boleh menyerah.
Jangan memilih takut...”



...karena Anda akan
menjadi orang yang
tidak berguna”

NOVEL BASWEDAN

Karya Mice Cartoon yang disumbangkan
untuk kegiatan penggalangan dana publik ICW
Dokumentasi: ICW